



## **Berdirinya Palang Merah Indonesia Cabang Yogyakarta Tahun 1945**

**Muchamad Triyanto,<sup>1\*</sup> Bambang Eka Saputra,<sup>2</sup> R.R. Sri Setyawati  
Mulianingsih,<sup>1</sup> Zulkarnain,<sup>3</sup> Lalu M. Istiqlal<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Hamzanwadi, Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Hamzanwadi, Indonesia

<sup>3</sup>Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Hamzanwadi, Indonesia

Email: triyantomuhamad924@gmail.com; pakdebambangdhp@gmail.com;  
srisetyawati750@gmail.com; zulkecerit1@gmail.com; istiqlalpraya@gmail.com

\*Korespondensi

**Article History:** Received: 13-05-2024, Revised: 13-06-2024, Accepted: 13-06-2024, Published: 13-06-2024

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap latar belakang berdirinya Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Yogyakarta pada masa awal kemerdekaan Indonesia di Yogyakarta. Cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi adalah dengan mengumpulkan buku, arsip, dan wawancara dengan mantan anggota PMI pada masa perang kemerdekaan di Yogyakarta. Pengolahan data untuk penulisan ini didasarkan pada pendekatan sejarah. Data yang diperoleh dari berbagai sumber diseleksi dan dilakukan kritik sumber serta disusun dalam hubungan faktual sehingga membentuk suatu pemahaman yang kemudian dituangkan dalam tulisan deskriptif naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terbentuknya PMI Cabang Yogyakarta merupakan hasil perjuangan setelah terbentuknya PMI Pusat pada tanggal 17 September 1945 yang disusul dengan terbentuknya PMI Cabang di Indonesia khususnya di kota-kota besar termasuk Yogyakarta. Rapat pembentukan PMI Cabang Yogyakarta digelar di gedung eks Badan Bantuan Keluarga Korban Perang (BPKKP). PMI Cabang Yogyakarta resmi dibentuk pada tanggal 29 September 1945.

### **Kata Kunci:**

latar belakang; perang kemerdekaan; PMI Cabang Yogyakarta

### **Abstract**

This research aims to reveal the background to the establishment of the Yogyakarta Branch of the Indonesian Red Cross (PMI) during the early days of Indonesian independence in Yogyakarta. The method used to obtain data and information is by collecting books, archives, and interviews with former PMI members during the war of independence in Yogyakarta. Data processing for this writing is based on a historical approach. Data obtained from various sources is selected and source critique is carried out and arranged in factual relationships to form an understanding which is then expressed in narrative descriptive writing. The results of the research show that the formation of the PMI Yogyakarta Branch was the result of the struggle after the Central PMI was formed on September 17, 1945, which was followed by the formation of PMI branches in Indonesia, especially in big cities including Yogyakarta. The PMI Yogyakarta Branch formation meeting was held in the building of the former War Victims' Family Relief Agency (BPKKP). PMI Yogyakarta Branch was officially formed on September 29, 1945.

### **Keywords:**

background; PMI Yogyakarta Branch; war of independence



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Pendahuluan

Setiap manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, sejak dilahirkan di dunia pada hakikatnya mempunyai derajat, hak-hak, serta martabat yang sama dan sebagai makhluk sosial saling memerlukan satu sama lain. Oleh sebab itu, menjadi kewajiban bagi seluruh umat manusia untuk saling tolong-menolong dalam segala keadaan baik dalam keadaan damai maupun perang, tanpa membedakan bangsa, politik, agama, kepercayaan, maupun golongan. Seperti apa yang dikatakan Jean Henry Dunant; “Kita semua bersaudara, semua penderitaan wajib mendapatkan perawatan yang sama” (Chabibah, 2021).

Periode revolusi fisik di Indonesia berlangsung antara tahun 1945-1950. Pada masa itu Belanda telah dua kali melakukan agresi militer terhadap wilayah RI. Agresi Militer pertama terjadi pada tanggal 21 Juli 1947 (Parinduri, 2022) dan yang kedua pada tanggal 19 Desember 1948 (Safitri, 2023). Revolusi fisik terjadi karena bangsa Indonesia tidak menginginkan Belanda berkuasa kembali di Indonesia yang telah merdeka. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta.

Pada sekitar tahun 1948 Indonesia sedang menghadapi masalah politik yang cukup berat. Di satu sisi Indonesia sedang menyelesaikan masalah-masalah di dalam negeri yang baru merdeka, disisi lain harus menghadapi Belanda yang menginginkan berkuasa kembali menjajah Indonesia. Masalah di dalam negeri yang dianggap paling serius adalah adanya pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun sehingga mengganggu stabilitas negara (Nami, 2022).

Kesempatan itu digunakan oleh Belanda untuk mengadakan Agresi Militer II atas wilayah RI. Kota Yogyakarta berhasil didudukinya. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Drs. Mohammad Hatta berhasil ditawan oleh tentara Belanda, tetapi sebelumnya pemerintah telah memberikan mandat kepada Menteri Syarifuddin Prawiranegara yang berada di Sumatera untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Panglima besar Jenderal Soedirman yang pada waktu Agresi Militer Belanda II dalam keadaan sakit berhasil meloloskan diri keluar kota untuk melakukan perang gerilya.

Perang gerilya diikuti oleh sebagian besar rakyat yang bersama-sama TNI saling bahu-membahu untuk membela dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Rakyat banyak yang bergabung di dalam laskar pejuang maupun menjadi sukarelawan yang bertugas di dapur umum dan di palang merah. Kraton Yogyakarta yang pada waktu itu menjadi markas gerilya. Hal itu sesuai dengan sambutan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, ketika pernyataan kemerdekaan Indonesia dikumandangkan, yang dimuat di surat kabar harian Sinar Matahari (Arvianita & Basuki, 2022).

Sekarang kemerdekaan telah berada di tangan kita, telah kita genggam, nasib nusa dan bangsa di tangan kita pula, tergantung pada kita sendiri. Kita harus menginsafi, bahwa lahirnya Indonesia merdeka itu dalam masa kegentingan, maka semua tidak terkecuali ialah menjaga, memelihara, dan membela kemerdekaan

nusa dan bangsa. Di Yogyakarta terdapat PMI yang mampu menyelenggarakan pengobatan luka tembak sehingga dapat memberikan banyak pengobatan luka tembak sehingga dapat memberikan banyak bantuan pertolongan pertama pada rakyat dan pejuang yang menjadi korban perang.

Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemuda pemudi yang secara sukarela bergabung di PMI mendirikan pos Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK) di garis depan dan menyelenggarakan dapur umum bersama masyarakat. Sebagai tanda anggota palang merah, mereka memakai lencana berupa tanda palang merah dengan warna dasar putih. Penderitaan rakyat akibat adanya pertempuran dengan tentara Belanda telah dapat dikurangi berkat adanya kegiatan PMI. Oleh karena itu, dengan melihat kenyataan di atas dapatlah kiranya diketahui betapa besarnya jasa PMI pada masa perang kemerdekaan, sehingga penulis ingin mengungkapkan sejauh mana latar belakang terbentuknya PMI Cabang Yogyakarta dalam masa perang kemerdekaan Indonesia di Yogyakarta tahun 1945.

Kajian tentang PMI di Indonesia sudah banyak dilakukan seperti buku terbitan PMI (1953). Buku ini berisi tentang latar belakang berdirinya PMI serta peranannya pada awal terbentuknya. Buku ini juga berisi tentang kerjasama antara PMI Pusat dengan PMI Cabang di seluruh Indonesia yang sudah ada pada waktu itu termasuk PMI Cabang Yogyakarta dalam menolong korban perang. Buku ini dipergunakan sebagai sumber primer dalam penulisan ini. Ada karya Karmaputra, (1976) tentang sejarah terbentuknya Palang Merah Internasional maupun Palang Merah Indonesia, kegiatan-kegiatan kepalangmerahan, serta peraturan-peraturan palang merah pada masa damai maupun perang. Ada juga buku Matia Maidjah (1976) tentang kisah dokter Satrio salah seorang anggota PMI yang bertugas pada masa perang kemerdekaan di daerah Banten. Buku kisah Dokter Gerilya berisi tentang kegiatan anggota PMI dalam menolong korban perang dengan berbagai permasalahan yang dihadapi anggota PMI pada masa perang kemerdekaan di daerah Banten.

Penelitian di atas tidak menjelaskan secara spesifik terkait latar belakang berdirinya PMI di Yogyakarta. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan latar belakang berdirinya Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Yogyakarta pada masa awal kemerdekaan Indonesia di Yogyakarta. Hal ini menarik untuk dikaji karena pada masa itu seluruh bangsa Indonesia baru saja meraih kemerdekaan dari tangan penjajah Jepang dan sedang berusaha untuk mempertahankan kemerdekaannya.

## Metode

Merekonstruksi dan menginterpretasikan peristiwa sejarah sebagai kisah diperlukan metode kritis yang meliputi usaha dalam menemukan data yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya (Kuntowijoyo, 2008). Kemudian diperlukan metodologi untuk memaparkan dan menjelaskan tentang kejadian-kejadian masa lampau dengan membuat rekonstruksi apa dan bagaimana hal itu terjadi. Metode yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi adalah dengan cara menghimpun dari Data-data dihimpun dari artikel jurnal ilmiah, buku, surat kabar. Pengolahan data untuk penulisan ini didasarkan pada pendekatan sejarah. Hal ini sengaja dipilih karena akan lebih mampu mengungkapkan latar belakang berdirinya PMI Cabang Yogyakarta pada masa perang kemerdekaan di Yogyakarta. Data-data yang diperoleh dari berbagai sumber diseleksi dan diadakan

kritik sumber serta dirangkaikan dalam hubungan fakta sehingga membentuk pengertian yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan yang bersifat deskriptif naratif.

## Hasil dan Pembahasan

### Latar Belakang Sejarah Terbentuknya PMI Cabang Yogyakarta

Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia sudah terdapat perhimpunan kepalangmerahan yang didirikan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Perhimpunan itu bernama *Het Nederlandsche Roode Kruis Afdeling Indonesia* (Het Nederlandsche Indische Roode Kruis atau disebut dengan Perjataan Nerkai) (Karma, 1976). Ketika itu perhimpunan kepalangmerahan itu hanya dipimpin oleh orang-orang bangsa Belanda saja. Putra-putra Indonesia pada masa itu sudah berhasrat untuk memiliki perhimpunan Palang Merah Nasional yang dipimpin oleh bangsa Indonesia sendiri, dan akan menyesuaikan derap langkahnya dengan cita-cita Palang Merah Internasional. Keadilan, kebenaran, dan perikemanusiaan harus dibina dan diselenggarakan oleh bangsa Indonesia sendiri.

Dr. Sendoek dan Dr. Bahder Djohan telah membuat rancangan untuk membentuk perhimpunan palang merah yang terlepas dari perhimpunan palang merah yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda (PMI, t.t.). Pada tahun 1940 kedua, dokter itu di depan konferensi Palang Merah Hindia Belanda *Nerkai* mengutarakan keinginan bangsa Indonesia untuk memiliki perhimpunan palang merah sendiri. Akan tetapi seluruh anggota *Nerkai* menolak dengan alasan bahwa bangsa Indonesia belum paham tentang kemanusiaan dan belum mampu untuk menyelenggarakan perhimpunan palang merah sendiri. Penguasa Belanda pada waktu itu sadar bahwa dengan melalui perhimpunan itu, semangat rakyat untuk merdeka akan lebih subur. Perjuangan untuk memiliki Palang Merah Nasional tidak dapat dipisahkan dari perjuangan kemerdekaan. Oleh karena itu, pemerintah Belanda berusaha merintanginya.

Pada masa penjajahan Jepang di Indonesia, kedua dokter itu kembali mengutarakan keinginannya untuk memiliki perhimpunan Palang Merah Nasional sendiri. Akan tetapi, Jepang juga tidak menghendaki adanya perhimpunan palang merah yang dipimpin oleh bangsa Indonesia sendiri. Perjuangan bangsa Indonesia untuk mewujudkan satu negara yang merdeka telah sampai pada akhir ketika Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta.

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, barulah perhimpunan Palang Merah Nasional dapat didirikan oleh bangsa Indonesia sendiri. Pada tanggal 3 September 1945, yaitu tujuh belas hari setelah proklamasi kemerdekaan RI, presiden Soekarno mengeluarkan perintah untuk membentuk suatu perhimpunan Palang Merah Nasional. Dr. Boentaran Martoatmodjo yang pada waktu itu menjabat Menteri Kesehatan RI menerima perintah itu. Kemudian pada tanggal 5 September 1945 dr. Boentaran Martoatmodjo menunjuk lima orang untuk menjadi panitia dalam membentuk perhimpunan Palang Merah Nasional (PMI, 1986). Panitia yang berjumlah lima orang tersusun sebagai berikut:

Ketua	: dr. R. Mochtar
Sekretaris	: dr. Bahder Djohan
Anggota	: dr. Sitamala

dr. Djohana  
dr. Markoeki

Pada tanggal 17 September 1945 telah tersusun oleh panitia itu suatu pengurus besar PMI (Mahatma, 2021), dengan susunan pengurus sebagai berikut:

Ketua Pengurus Besar Pleno : Drs. Mohammad Hatta

Ketua Pengurus Besar Harian: dr. Boentaran Martoatmodjo

Pelantikan pengurus besar PMI yang pertama dilakukan oleh Wakil Presiden Drs. Mohammad Hatta di jalan Soerja No. 1 Jakarta. Tanggal 17 September 1945 merupakan tonggak sejarah PMI, kemudian lahirlah cabang-cabang PMI di seluruh Indonesia (PMI, 1952). Cabang-cabang PMI pada waktu itu baru didirikan di kota-kota besar saja, termasuk PMI Cabang Yogyakarta.

Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan ke seluruh penjuru Indonesia, maka dukungan terhadap pernyataan kemerdekaan itu diperoleh dari segenap lapisan masyarakat, demikian juga masyarakat di Yogyakarta. Mereka bergerak dengan penuh semangat memutar roda revolusi. Masa rakyat bersiap untuk menyesuaikan diri dalam alam kemerdekaan, dengan tekad dan semboyan sisa-sisa kolonial harus dibersihkan. Masyarakat Yogyakarta dengan kesadaran untuk mengisi kemerdekaan ikut berpartisipasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bidangnya adalah membentuk suatu badan sosial yang bergerak memberi pertolongan pada sesama manusia yang didasari nilai-nilai kemanusiaan. Beberapa dokter yang berada di Yogyakarta mengikuti jejak rekan-rekannya yang tinggal di Jakarta untuk membentuk PMI Cabang. PMI Cabang Yogyakarta dibentuk pada tanggal 29 September 1945. Rapat pembentukan PMI Cabang Yogyakarta diadakan di gedung bekas Badan Pertolongan Keluarga korban Perang (BPKKP). Ketua PMI Cabang Yogyakarta yang pertama dijabat oleh dr. Soekiman Wirjosandjojo, sedangkan markas PMI Cabang Yogyakarta menempati sebuah gedung di Jalan Secodiningratan.

Anggota-Anggota PMI dihimpun dari pemuda pemudi sebagai tenaga *Mobele Cologne* (MC). Mereka adalah pasukan gerak cepat yang memberi pertolongan darurat. Anggota MC terdiri dari pemuda pemuda, pelajar, mahasiswa yang tidak menggabungkan diri dalam PMI. Anggota-anggota MC di daerah kota Yogyakarta dihimpun dari pemuda pemudi yang ada di setiap daerah *Kemantren*/ Menteri Pamong Prodjo (MPP). Di setiap daerah *Kemantren* dibentuk ranting-ranting PMI dan didalam PMI Ranting diselenggarakan kegiatan latihan PPPK bagi anggota MC. Di dekat kantor kepatihan yang juga pernah digunakan untuk menyelenggarakan latihan PPPK bagi anggota MC, tetapi kemudian tempatnya dipindahkan digunakan untuk menyelenggarakan latihan PPPK bagi anggota MC, tetapi kemudian tempatnya dipindahkan kerumah sakit Bethasda. Latihan PPPK bagi anggota MC dibimbing oleh dokter-dokter yang tinggal di Yogyakarta. PMI didalam menyelenggarakan latihan PPK bagi anggota MC bekerja sama dengan Jawatan Kesehatan Kota (DKK) dan Djawatan Kesehatan Rakyat (DKR).

PMI sebagai badan sosial yang bekerja untuk memberikan pertolongan bagi sesama umat manusia dalam segala keadaan. Pada tahun-tahun pertama terbentuknya, bangsa Indonesia masih menghadapi pertempuran-pertempuran untuk membela dan mempertahankan kemerdekaan dari bangsa asing yang akan menjajah Indonesia. PMI Cabang Yogyakarta dalam hal itu ikut berperan aktif dalam menolong korban perang, untuk itu PMI Cabang Yogyakarta mengirimkan anggota-anggota MC ke daerah-daerah pertempuran. Selain itu PMI Cabang

Yogyakarta juga berperan aktif dalam menangani masalah-masalah sosial yang timbul akibat adanya perang. Masalah-masalah sosial tersebut antara lain: mengurus tawanan perang, pengungsi, dapur umum, dan juga menyelenggarakan pemulangan para bekas romusha.

### **Kegiatan-Kegiatan Sosial Pada Awal Terbentuknya**

Perkembangan PMI Cabang Yogyakarta selanjutnya didukung situasi politik pada masa itu; pertempuran-pertempuran yang berlangsung di daerah-daerah memerlukan campur tangan PMI untuk ikut serta dalam menolong korban perang. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tentara Jepang masih berada di Indonesia dengan persenjataan yang lengkap dan modern. Untuk mewujudkan dan membuktikan bahwa kekuasaan negara Indonesia berada di tangan bangsa sendiri, khususnya di Yogyakarta. Diadakan aksi serempak untuk merebut kekuasaan dan melucuti senjata tentara Jepang. Aksi perebutan kekuasaan yang berlangsung di daerah Yogyakarta dilakukan dengan cara kekerasan dan tanpa kekerasan. Proses perebutan tanpa kekerasan dilakukan apabila berlangsung dengan mudah tanpa adanya perlawanan dari pihak Jepang, misalnya aksi perebutan kekuasaan di pabrik-pabrik, kantor pemerintah, penerbitan Sinar Matahari, stasiun radio, dan lain sebagainya. Adapun yang dilakukan dengan cara kekerasan yaitu ketika melakukan perebutan kekuasaan di asrama militer Kotabaru.

Di dalam melakukan perebutan kekuasaan di asrama militer Kotabaru, rakyat hanya berlandaskan semangat kemerdekaan dan senjata yang tidak seimbang dengan tentara Jepang. Mereka berhasil mengalahkan tentara Jepang dengan persenjataannya lengkap dan modern. Kekerasan pihak Jepang diperlihatkan dalam beberapa pertempuran di daerah-daerah karena mereka harus mematuhi perintah Sekutu sebagai pihak yang menang perang dalam Perang Dunia II. Sekutu memerintahkan Jepang untuk tetap menjaga keamanan di daerah-daerah yang diduduki sampai dengan kedatangan Sekutu di Indonesia serta menyerahkan Indonesia sebagai inventaris Jepang kepada Sekutu dalam keadaan utuh.

Pertempuran dan perlucutan senjata Jepang di asrama militer Kotabaru didahului dengan perundingan antara Moh. Saleh, Bardoso, Soenjoto, dan R. P. Soedarsono, kesemuanya dari pimpinan Badan Keamanan Rakyat (BKR) di satu pihak dan dipihak Jepang: Mayor Otsuka, Kenpetai Taico Sake, Kapten Ito, dan Cianbuco, bertempat di rumah Bataico Kotabaru. Di dalam perundingan itu R.P. Soedarsono meminta agar Bataico Mayor Otsuka menyerahkan senjatanya kepada Indonesia. Perundingan itu mengalami jalan buntu, maka diambil keputusan bahwa BKR akan melakukan perlucutan senjata dan kalau perlu dengan kekerasan.

Sesudah perundingan gagal, pada tanggal 6-7 Oktober 1945 di kampung-kampung diadakan persiapan untuk menyerang asrama militer Kotabaru. Massa rakyat yang persenjataannya tidak seimbang dengan persenjataan tentara Jepang, dengan bersemangat menyerang asrama militer Kotabaru. Pada penyerbuan itu banyak oemuda yang naas, mereka terkena sasaran peluru tentara Jepang. Pada saat terkena tembakan, Soepadi masih sempat mengangkat senjatanya dan menembakkan ke arah tentara Jepang. Namun tidak lama kemudian tenaganya tidak berdaya dan roboh. Teman-teman yang berdekatan masih sempat menolong dan membawanya ketempat lain untuk diberi pertolongan.

Pada pagi itu pula datang bantuan PMI dari Rumah Sakit Bethesda untuk menolong korban pertempuran. Soepadi dibawa ke gedung yang seakrang

digunakan untuk SMP V agar mendapat pertolongan. Pada saat pertempuran Kotabaru, PMI Cabang Yogyakarta turut berperan aktif dalam menolong korban perang dengan menirinkan anggota-anggota MC ke daerah pertempuran. Korban pertempuran Kotabaru selain dibawa ke Rumah Sakit Bethesda juga dibawa ke pos-pos PMI terdekat.

Didalam pertempuran itu membawa korban dari kedua belah pihak. Pihak Indonesia tercatat 21 orang gugur dan 32 orang menderita luka-luka. Korban pihak tentara Jepang 9 orang gugur dan 20 orang menderita luka-luka. Korban yang gugur dari pihak Indonesia selanjutnya dimakamkan di taman makam pahlawan Kusumanegara, Kuncen, dan Karang Kajen. Pertempuran Kotabaru meskipun telah banyak korban yang jatuh namun kemenangan dapat diraih oleh pejuang RI. Pertempuran yang heroik dan patriot itu menunjukkan kesadaran pejuang untuk menegakkan negara Indonesia dari penjajahan bangsa asing.

Sementara itu Pemerintahan Pusat yang sedang berbenah diri, terutama untuk mewujudkan keamanan dan kepentingan pertahanan nasional. Pada tanggal 5 Oktober 1945 berhasil dibentuk: Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dengan pimpinan TKR terpilih adalah Shodanhyo Soperiyadi, pemimpin pemberontakan laskar Pembela Tanah Air (PETA) di Blitar. Akan tetapi karena Soepriyadi tidak pernah muncul maka pada bulan Nopember 1945 diadakan musyawarah untuk menggantikannya. Kemudian pada tanggal 18 Desember 1945 terpilih Kolonel Soedirman dari Divisi Banyumas untuk menggantikannya dan pangkatnya dinaikkan menjadi Letnan Jenderal, sedangkan Mayor Jenderal Perip Soemohardjo sebagai Kepala Staf Umum TKR. Markas besar TKR berada di Yogyakarta, dengan adanya kenyataan ini dapat diketahui betapa besar arti pentingnya Yogyakarta sebagai pusat pertahanan dan keamanan.

Sehubungan dengan terbentuknya badan ketentaraan itu, pemerintah Daerah Istiwa Yogyakarta (DIY) mengeluarkan maklumat No. 6 tahun 1945 yang berisi tentang kesehatan, pengobatan, dan perawatan bagi anggota tentara. Jawatan Kesehatan. serta ahli kesehatan di DIY diperintahkan untuk membentuk regu-regu ponolong di dekat pertempuran. Jika dibutuhkan, maka PMI, dokter, juru rawat, dan lain sebagainya untuk meningkatkan pengabdian dan partisipasinya terhadap perjuangan pada waktu itu.

Sementara itu, diawali dengan datangnya Mayor Greenhalgh di Jakarta pada tanggal 19 Desember 1945 pihak sekutu bertujuan untuk mengadakan penyelesaian perang dengan membuat markas Sekutu di Jakarta. Disusul kemudian dengan datangnya pasukan Sekutu di Jakarta, yang khusus di Indonesia dipimpin oleh Letnan Jenderal Sir Phelip Cristison. Pada mulanya kedatangan Sekutu disambut dengan baik oleh pihak Indonesia. Apalagi diadakan perundingan dengan Sir Philip Cristison pada tanggal 1 Oktober 1946.

Pimpinan sekutu menyadari situasi sedang dihadapi di Indonesia cukup hangat. Oleh karena itu sekutu tanpa bantuan Indonesia akan sulit melaksanakan tugasnya di Indonesia. Dari perundingan itu dinyatakan bahwa sekutu mengakui secara *de facto* atas kekuasaan Indonesia. Oleh karena itu untuk menghormati tugas mereka, pihak sekutu bertugas di Indonesia disambut dengan tangan terbuka oleh pejabat-pejabat Indonesia. Namun setelah melihat kenyataan selanjutnya, bahwa mereka membawa serta orang-orang *Netherland Indies Civil Administration* (NICA), yang kemudian dengan terang-terangan akan menjajah kembali Indonesia, jelas perbuatan itu merupakan ancaman bagi kemerdekaan Indonesia.

Situasi Indonesia yang masih hangat oleh semangat kemerdekaan terasa makin panas ketika ditambah provokasi-provokasi yang dilakukan oleh Belanda, bahkan pihak Sekutu/Inggris sendiri sering memancing kerusuhan-kerusuhan, maka tidak terhindarkan lagi perang kemerdekaan berkobar diman-mana, seperti di Jakarta, Bandung, Semarang, Ambarawa, Magelang, Surabaya antara rakyat Indonesia melawan Belanda yang dibantu Inggris. Yogyakarta juga tidak terlepas dari kerusuhan-kerusuhan yang ditimbulkan oleh tentara Inggris, dengan menembaki gedung Radio Republik Indonesia, Sonobudoyom dan Balai Mataram, pada tanggal 25 Nopember 1945 dan diulangi kembali pada tanggal 27 Nopember 1945 (Badan Musawarah Musea Daerah Istimewa Yogyakarta Perwakilan Jakarta, 1985; Kartodirdjo, et al., 1975).

Adanya pertempuran-pertempuran yang terjadi di Yogyakarta dan di luar daerah Yogyakarta itu, PMI Cabang Yogyakarta turut ikut berperan aktif dalam menolong korban perang. PMI Cabang Yogyakarta selain harus menangani peristiwa-peristiwa yang terjadi di Yogyakarta juga mengirimkan anggota-anggota MC untuk memberikan pertolongan bagi korban perang yang ada dalam pertempuran-pertempuran di luar daerah Yogyakarta. Tenaga-tenaga PMI yang ditugaskan daerah-daerah pertempuran di luar Yogyakarta dihimpun dari anggota-anggota MC yang ada di dalam pos-pos ranting PMI di kota Yogyakarta.

Sehubungan pertempuran berkobar di mana-mana maka pada tanggal 4 Januari 1946 Presiden Soekarno dan Wakil presiden Mohamad Hatta hijrah dari Jakarta ke Yogyakarta, dengan pertimbangan bahwa telah terjadi perjanjian antara Indonesia dengan sekutu yang isinya pihak Sekutu tidak akan memasuki dua wilayah kerajaan Yogyakarta dan Surakarta. Oleh karena itu untuk sementara Yogyakarta menjadi Ibu kota sekaligus pusat pemerintahan RI. Perkembangan situasi di Jakarta pada masa awal kemerdekaan tidak aman lagi karena adanya tekanan-tekanan dari tentara Belanda. Adanya tekanan-tekanan itu maka pada akhir tahun 1946 dirasa bahwa organisasi seluruhnya tidak dapat dikemudikan dari Jakarta, demikian juga dengan perhimpunan PMI Pusat.

Untuk memperbincangkan kesulitan-kesulitan itu, maka pada tanggal 16-17 Oktober 1946 diadakan kongres PMI yang pertama dan dihadiri oleh seluruh cabang-cabang PMI di Indonesia. Pada kongres itu diputuskan untuk memindahkan kantor PMI Pusat dari Jakarta ke Yogyakarta, sedangkan di Jakarta diadakan perwakilan kantor pusat dibawah pimpinan dr. Bahder Djohan. Mulai tahun 1946 markas PMI Pusat mengemudikan kegiatan-kegiatannya di Jalan Gondokusuman No. 14 Yogyakarta. Setelah PMI Pusat berkedudukan di Yogyakarta, PMI Cabang Yogyakarta tidak meleburkan diri dalam PMI Pusat melainkan tetap berkedudukan sebagai PMI Cabang dengan markas menempati sebuah gedung di Jalan Secodonggratan. Markas PMI Pusat berkedudukan di Yogyakarta, selama Yogyakarta masih menjadi ibukota negara Indonesia. Setelah terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS) dan kembalinya ibu kota ke Jakarta. PMI Pusat juga kembali mengemudikan kegiatannya dari Jakarta. PMI Cabang Yogyakarta kemudian menempati gedung markas PMI Pusat di Jalan Gondokusuman No. 14 Yogyakarta (PMI, 1952).

Sesuai dengan tujuan PMI dibentuk untuk membantu pemerintah dengan sukarela di bidang kemanusiaan sebagai pengamalan Pancasila. Pada masa awal proklamasi kemerdekaan Indonesia muncul berbagai masalah sosial di Indonesia yang memerlukan bantuan PMI. Selain memberikan pertolongan pada korban



perang yang menderita luka-luka. PMI Cabang Yogyakarta juga memberikan bantuan pada masalah pengungsian, tawanan perang, menyelenggarakan dapur umum, dan masalah-masalah sosial lainnya.

Selama Jepang berkuasa di Indonesia, mulai terasa bahwa perekonomian bertambah hancur, persediaan barang semakin berkurang, toko-toko dagangannya semakin menipis, sedangkan daya beli rakyat semakin rendah, sistem jatah dan antri sudah tidak memadai lagi (Media Museumnusantara, 2022). Akhirnya, rakyat dilepas untuk mencari hidup sendiri. Setiap hari rakyat belum tentu makan nasi tiga kali sehari. Nasi jagung, singkong, dan umbi-umbian lainnya menggantikan kedudukan beras. Daun *jlegor*, sayur pepaya muda, *blenguk* (eceng gondok) adalah menu makanan kebanyakan rakyat sehari-hari. Di dalam keadaan semacam itu rakyat mulai diberi propaganda untuk makan bekicot. Bahan makanan yang bermutu baik seperti beras, daging, dan sebagainya disita untuk kebutuhan tentara Jepang.

Pada masa penjajahan Jepang di Indonesia, kesehatan rakyat tidak begitu diperhatikan, terutama dalam hal makanan, sehingga menimbulkan berbagai macam penyakit karena makanan yang kurang baik dan bergizi (Azizah, 2022). Berbagai penyakit mulai diderita rakyat, seperti penyakit *Honger Oedeem* (HO), penyakit kulit (*gudhig*), penyakit mata (*belek*), penyakit perut karena makan biji jarak sebagai pengganti minyak kemiri. Semua itu diderita rakyat pada masa penjajahan Jepang di Indonesia.

PMI Cabang Yogyakarta dalam rangka memperbaiki kesehatan rakyat itu menyelenggarakan dapur umum bahan-bahan makanannya cukup baik dan bergizi. Sejak bulan Nopember 1945 setiap hari dapur umum PMI menyediakan makanan kira-kira untuk 1500 jwa, di dalam hal ini dapur umum juga mendapat bantuan dari orang-orang Tionghoa dengan turut menyediakan makanan. Selain itu dengan adanya penyakit *honger oedeem* yang diderita rakyat dan tidak diobati maka banyak rakyat terlantar meninggal dunia di pinggir-pinggir jalan akibat penyakit kekurangan gizi tersebut. PMI Cabang Yogyakarta di dalam hal ini juga berperan aktif dalam menolong orang meninggal dunia yang terlantar di pinggir-pinggir jalan, untuk dirawat secara semestinya.

Penderitaan sebagai akibat dari adanya peperangan, tidak hanya diderita oleh para pejuang yang bertempur, melainkan juga dialami oleh penduduk sipil yang tidak ikut berperang. Bahkan mereka akan mengalami nasib yang lebih menyedihkan apabila pertempuran terjadi di daerah tinggal mereka, sehingga mereka terpaksa mengungsi ke daerah yang lebih aman. Salah satu kewajiban PMI pada masa perang adalah memberikan pertolongan pada masalah pengungsi. Untuk itu PMI Cabang Yogyakarta di dalam memberikan pertolongan pada pengungsi untuk sementara menyediakan papan penginapan dan makanan sederhana bagi mereka yang tidak mempunyai teman atau saudara di Yogyakarta. Mulai bulan Mei 1945 pekerjaan itu dilakukan oleh Pemerintahan Daerah bagian sosial "Paranto Prodjo".

Di samping itu PMI Cabang Yogyakarta juga berperan aktif dalam mengurus masalah pencarian dan pemulangan bekas tenaga romusha. PMI di dalam usah ini mengalami banyak kesulitan antara lain: pertama, disebabkan karena tidak dapat diperoleh data-data yang lengkap tentang pengiriman tenaga romusha ke tempat mereka dipekerjakan. Kedua, pihak NERKAI tidak bersedia untuk bekerja sama dalam usaha pencarian dan pemulangan bekas tenaga romusha. Hal tersebut

dikarenakan menurut NERKAI tidak bersedia untuk bekerjasama dalam usaha pencarian dan pemulangan bekas tenaga romusha. Hal tersebut dikarenakan menurut NERKAI perhimpunan PMI adalah perhimpunan yang tidak sah. Namun kemudian atas campur tangan *International Cross* pada tanggal 18 Oktober 1945 disetujui bahwa pencarian dan pemulangan bekas tenaga romusha diurus bersama-sama.

PMI Cabang Yogyakarta selain itu juga memberikan bantuannya dalam masalah perlindungan dan pemulangan tahanan perang. Adanya kekalahan Jepang dalam perang dunia kedua maka kedudukan tentara Jepang di Indonesia adalah tawanan perang sekutu, sedangkan dalam masalah ini Indonesia sebagai perantara antara Jepang dengan sekutu, pada akhirnya sekutu akan mengembalikan tawanan perang Jepang negaranya. PMI di dalam usaha membantu pemulangan bekas tawanan Jepang dan Belanda yang pada masa perang dunia kedua ditawan tentara Jepang juga memberikan bantuan dengan menjaga kesehatan mereka selama masih di kamp-kamp tawanan maupun dalam perjalanan. Setiap rombongan yang berangkat ke Jakarta disertai dokter dan juru rawat. Para tawanan perang tersebut diangkut dengan pesawat terbang maupun kereta api ke Jakarta dengan dikawal TRI.

Masalah pencarian keluarga yang terpisah merupakan salah satu tugas yang harus diselesaikan sebagai akibat adanya perang. PMI Cabang Yogyakarta dalam hal ini turut menaruh perhatian dalam usaha pencarian keluarga yang terpisah antara keluarga yang ada di Yogyakarta dengan keluarga yang ada di daerah pendudukan Belanda yang lain maupun keluarga yang ada di luar negeri maupun sebaliknya. Sejak terputusnya hubungan dengan daerah-daerah kependudukan Belanda, PMI mengusahakan penyiaran berita keluarga melalui radio dan juga surat menyurat.

Pada awal terbentuknya, PMI dalam segala hal, baik obat-obatan maupun peralatan kesehatan, masih serba kekurangan. Oleh karena itu, dalam usaha memperoleh obat-obatan dan peralatan kesehatan, PMI Pusat mengadakan kerja sama dengan *International Committee of the Red Cross* (ICRC) dan palang merah dari berbagai negara dalam melakukan tugas kemanusiaan. Usaha-usaha ini selalu mendapatkan rintangan dari pihak penguasa Belanda. Mereka menganggap bahwa yang berdaulat atas wilayah Indonesia adalah Belanda. Akan tetapi, akhirnya mereka mengakui ketidakmampuannya dalam menangani masalah-masalah sosial yang timbul. Hal itu dapat dibuktikan dengan datangnya surat kepada pengurus besar PMI untuk melakukan tugas-tugas kepalangmerahan di Indonesia, padahal sebelumnya ICRC selalu menolak untuk bekerja sama dengan PMI karena mereka menganggap bahwa yang berdaulat atas wilayah Indonesia adalah Belanda.

Setelah diadakan kerjasama itu, bantuan dari berbagai palang merah negara lain maupun ICRC berdatangan ke Indonesia. Ketika Agresi Militer Belanda I atas wilayah RI sedang berlangsung, PMI mendapat bantuan obat-obatan dari Palang Merah Malaya. Bantuan itu datang pada tanggal 29 Juli 1947 dengan diangkut pesawat Dakota CT-CLA dari Singapura menuju Yogyakarta. Akan tetapi, sebelum pesawat Dakota sempat mendarat ke paangan Udara Maguwo telah tertembak jatuh oleh dua pesawat pemburu Belanda. Pesawat Dakota jatuh dan terbakar di Desa Ngoto Yogyakarta. Di dalam peristiwa itu korban manusia yang diakibatkan adalah:

1. *Ex Wing Commander Constantin* beserta istri.
2. *Ex. Squadronleader Hazelhurst*
3. Bida Ram, ahli pesawat berkebangsaan India
4. Komodor Muda Udara A. Adisoetjipto
5. Komodor Muda Udara Dr. Abdoerachman Saleh
6. Opsir Muda Udara I. Adisoemarmo Wirjokoesomo
7. Seorang berkebangsaan Inggris tak dikenal
8. Arifin
9. Abdoel Gani (Ayatrohaedi, Haris, & Sutjianingsih, 1994)

Yang disebut di atas dari nomor satu sampai dengan nomer delapan korban meninggal dunia sedangkan nomor sembilan menderita luka-luka. Sumbangan obat-obatan dari India tiba di Yogyakarta berturut-turut pada tanggal 28-29 Agustus 1947. Dua buah pesawat udara India membawa obat-obatan dan tiga orang dokter yang secara sukarela membantu perjuangan rakyat Indonesia. Ketiga orang dokter itu adalah: dr. Hirula, dr. Sen, dan dr. Ray. Ikut serta dalam rombongan itu wakil-wakil dari ICRC, yaitu: Sechliman, Van Esch, dan Wetsel untuk menyaksikan penyerahan obat-obatan.

Mesir sebagai negara pertama yang mengakui berdirinya negara RI kembali memberikan bantuannya. Perhimpunan Bulan Sabit Merah (*Red Creacent*) Mesir mengirimkan bantuan obat-obatan. Bantuan obat-obatan dari Mesir tiba di lapangan udara Maguwo Yogyakarta, pada tanggal 5 Maret 1948. Obat-obatan itu sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia yang sedang berjuang menegakkan kemerdekaannya (Munandar, 2008).

Bantuan obat-obatan dari berbagai palang merah luar negeri tidak hanya ditujukan di Yogyakarta saja, tetapi juga ditujukan ke daerah-daerah lain di Indonesia. Seperti Jakarta, Sumatra, dan lain-lainnya. Bantuan obat-obatan yang ditujukan ke Yogyakarta diterima oleh PMI Pusat dan untuk selanjutnya dibagikan ke PMI Cabang termasuk PMI Cabang Yogyakarta. Adanya bantuan obat-obatan itu sangat menolong PMI Cabang Yogyakarta karena persediaan obat bertambah dan cukup untuk memberikan pertolongan korban perang. Pada masa perang kemerdekaan II, walaupun tidak lengkap, obat-obatan itu yang menyertai regu-regu penolong PMI dalam memberikan pertolongan pada korban perang.

## Kesimpulan

Pada awal-awal kemerdekaan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia masih melakukan perang melawan tentara bersenjata Belanda yang akan mengembalikan kekuasaannya menjajah Indonesia. Masyarakat Yogyakarta dengan kesadaran untuk mengisi kemerdekaan ikut berpartisipasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bidangnya adalah membentuk suatu badan sosial yang bergerak memberi pertolongan pada sesama manusia yang didasari nilai-nilai kemanusiaan. Tanggal 17 September 1945 merupakan tonggak sejarah berdirinya PMI, kemudian diikuti lahirnya cabang-cabang PMI di seluruh Indonesia. Cabang-cabang PMI pada waktu itu baru didirikan di kota-kota besar saja, termasuk PMI Cabang Yogyakarta. Beberapa dokter yang berada di Yogyakarta mengikuti jejak rekan-rekannya yang tinggal di Jakarta untuk membentuk PMI Cabang. Hal ini yang menjadi alasan didirikannya PMI Cabang Yogyakarta tanggal 29 September 1945.

## Referensi

- Arvianita, I., & Basuki, Y. E. (2022). Pertunjukan Amal: Dana Awal Perjuangan Rakyat di Yogyakarta 1945-1947. *Lembaran Sejarah*, 18(1), 25-42. <https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.80450>.
- Ayatrohaedi, Haris, T., Sutjianingsih, S. (1994). Angkatan Udara Indonesia. In *Kumpulan Buklet Hari Bersejarah II*. Jakarta: Depdikbud.
- Azizah, N. (2022). Sejarah Kehidupan Ekonomi Indonesia Masa Penjajahan Jepang: Kehidupan ekonomi rakyat Indonesia pada masa penjajahan Jepang mencatatkan sejarah yang cukup kelam. <https://tirto.id/sejarah-kehidupan-ekonomi-indonesia-masa-penjajahan-jepang-gpXF>.
- Badan Musawarah Musea Daerah Istimewa Yogyakarta Perwakilan Jakarta, (1985). YOGYA Benteng Proklamasi. Jakarta: Badan Musawarah Musea Daerah Istimewa Yogyakarta Perwakilan Jakarta.
- Chabibah, U. (2021). Ilham Perdamaian Jean Henry-Dunant dari Medan Perang Solferino. <https://tirto.id/ilham-perdamaian-jean-henry-dunant-dari-medan-perang-solferino-gkR4>.
- Kartodirdjo, S., et al., (1975). *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*. Jakarta: Departemen P & K.
- Kuntowijoyo, (2008). *Penjelasan Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Mahatma, R. (2021). *Palang Merah Indonesia (PMI): Sejarah, Peran, dan Tantangan*. <https://www.kompas.id/baca/paparan-topik/2021/09/17/palang-merah-indonesia-pmi-sejarah-peran-dan-tantangan>.
- Media Museumnusantara, (2022). Pendudukan Jepang di Indonesia : Latar Belakang, Tujuan, & Dampaknya. <https://museumnusantara.com/pendudukan-jepang-di-indonesia/>.
- Munandar, H. (2008). *Mengenal PMI dan BaSARnas, Dua Garda Terdepan Menghadapi Bencana: Misi, Peranan, serta Arti Penting PMI dan BaSARnas bagi Masyarakat Luas*. Jakarta: Erlangga.
- Nami, N. I. B. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan Gerakan Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) 1926-1927. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 14(1), 1-16. <https://doi.org/10.32734/politeia.v14i1.6360>.
- Parinduri, A. (2022). Sejarah Agresi Militer Belanda I: Latar Belakang, Kronologi, Dampak Agresi Militer Belanda I menjadi rangkaian peristiwa penting dalam sejarah perang mempertahankan kemerdekaan RI. <https://tirto.id/sejarah-agresi-militer-belanda-i-latar-belakang-kronologi-dampak-f9BS>.
- PMI, (1952). *Sedjarah PMI 17 September 1945-31 Desember 1952*. Djakarta: Markas Besar PMI.
- PMI, (1986). Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI. Jakarta: Musyawarah Nasional PMI ke VIV, 22-26 November 1986.
- PMI, (t.t.). *Tentang Palang Merah Indonesia*. <https://www.pmi.or.id/tentang-kami/>.

Putra, K. (1976). *Palang Merah Indonesia*. Bandung: PT. Sangabuana.

Safitri, A. (2023). Perjuangan Rakyat dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Pada Agresi Militer II 1948-1949 di Pulau Jawa. *HEURISTIK: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 3(1), 23-34.  
<https://heuristik.ejournal.unri.ac.id/index.php/HJPS/article/view/65>.